

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. PT Bio Farma (Persero) dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha, badan hukum dapat dikualifikasikan sebagai konsumen, dan vaksin COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai barang berdasarkan UUPK. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam vaksinasi gotong royong COVID-19 di Indonesia dapat didasarkan pada UUPK.
2. Tanggung jawab hukum PT Bio Farma (Persero) merupakan tanggung jawab kontraktual. UUPK hanya mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab kontraktual yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak baku. Sedangkan kontrak yang sifatnya tidak baku diatur dalam KUH.Perdata. Oleh karena itu, tanggung jawab kontraktual PT Bio Farma (Persero) sebagai pelaku usaha terbagi menjadi 2. Pertama, kontrak yang sifatnya baku tunduk pada UUPK dan kontrak yang sifatnya tidak baku tunduk pada KUH.Perdata.
3. Konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa, baik melalui peradilan (litigasi) maupun di luar peradilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui peradilan dilakukan di lingkungan peradilan umum. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar peradilan dilakukan melalui BPSK.
4. Apabila karyawan/karyawati sebagai pihak yang menerima vaksin COVID-19 mengalami KIPI, maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan santunan cacat atau kematian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021. Namun, pemerintah hanya memberikan santunan cacat atau kematian setelah adanya riset atau penelitian dari Komnas KIPI sesuai kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.

## **2. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam vaksinasi gotong royong COVID-19 di Indonesia, maka saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut mengenai vaksinasi gotong royong COVID-19. Salah satunya adalah mengenai tarif maksimal vaksinasi gotong royong COVID-19. Perubahan terhadap jenis vaksin yang dapat digunakan dalam vaksinasi gotong royong COVID-19 harus diikuti dengan perubahan terhadap besarnya tarif maksimal vaksinasi, mengingat bahwa besaran tarif maksimal yang telah diatur hanya untuk vaksin jenis Sinopharm. Pengaturan yang lebih jelas dan pasti diharapkan dapat mendorong lebih banyak badan hukum untuk mengadakan vaksinasi gotong royong COVID-19 dan membantu pemerintah dalam program vaksinasi COVID-19 nasional.
2. Pelaku usaha, dalam hal ini PT Bio Farma, dan konsumen, dalam hal ini badan hukum, diharapkan memperhatikan dan melaksanakan hak serta kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong COVID-19. Alasannya adalah karena vaksinasi berhubungan dengan kesehatan sehingga pelaksanaannya pun perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ada. Kelalaian salah satu pihak dapat berujung pada kecacatan atau kematian penerima vaksin.
3. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gugatan sederhana, mengingat gugatan sederhana dapat menjadi pilihan bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan nilai gugatan yang tidak melebihi Rp 500.000.000,00.
4. Pemerintah perlu memperbaiki dan mengatur lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa melalui BPSK, mengingat adanya beberapa pertentangan dalam UUPK.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ahmadi Miru, et. al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2009.
- Dewa Gde Rudy, et.al. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Udayana, 2016.
- Johannes Gunawan, et. al., *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Jakarta, Proyek ASEAN-Jerman PROTECT *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, 2021.
- Philippus M. hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005.
- Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al, *A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China*, *N Engl J Med*. 2020;382(8), 2019.

### **Bahan Non-Publikasi**

- Johannes Gunawan, et. al., *Materi Perkuliahan Hukum Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Johannes Gunawan, et. al., *Materi Perkuliahan Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Johannes Gunawan, et.al., *Materi Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

## **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diunduh dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi> pada tanggal 14 April 2021 pukul 17:29 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diunduh dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mortalitas> pada tanggal 15 April 2021 pukul 10:39 WIB.

## **Jurnal dan Skripsi**

Aditya Susilo, dkk., *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 7 Nomor 1, Maret 2020, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, 2020.

Ika Mauliddiyah, *Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Pengawasan Peredaran Vaksin Ditinjau dari Peraturan Peredaran Obat dan Vaksin di RSUD Dr. ISKAK Kabupaten Tulungagung Oleh Dinkes Kabupaten Tulungagung dan BPOM Jawa Timur*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, dan Iskandar Muka, *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Benefita, Volume 5(2), Juli 2020, LLDIKTI Wilayah X, 2020.

Faishal Nur'Arafa Supandi, *Pengaruh COVID 19 Terhadap Mortalitas dan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran.

Indah Pitaloka Sari dan Sriwidodo, *Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19*, Majalah Farmasetika, Volume 5 (5) 2020, Fakultas Farmasi, Universitas Padjajaran, 2020.

Matdio Siahaan, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*, Jurnal Kajian Ilmiah (JKI), Edisi Khusus No. 1 (Juli 2020), Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.

Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S. Jawetz, Melnick, & Adelberg's, *Medical Microbiology*, 28th ed., New York: McGrawHill Education/Medical, 2019.

Syahrial, *Dampak COVID-19 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia*, Jurnal Ners, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2020.

### **Peraturan Perundang- Undangan**

Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020, Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, Perubahan Atas Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Penyelenggaraan Imunisasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020, Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021, Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sasaran Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 Tentang Penetapan Besaran HArga Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Tarif Maksimal Pelayanan Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, Produk Vaksin COVID-19 Dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero).

### **Artikel Online**

Angela Winda, “Guru Tari di Sukabumi Mendadak Lumpuh dan Mengalami Gejala Kebutaan, Setelah Vaksin Covid-19”, diunduh dari <https://www.kompas.tv/article/170240/guru-tari-di-sukabumi-mendadak-lumpuh-dan-mengalami-gejala-kebutaan-setelah-vaksin-covid-19> pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 09:04 WIB.

CNN Indonesia, “Komnas KIPi Terima 229 Laporan Efek Serious Vaksin Covid-19”, diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210520152333-20-644809/komnas-kipi-terima-229-laporan-efek-serius-vaksin-covid-19> pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 08:40 WIB.

CNN Indonesia, 26 Januari 2021, “Kemenkes Tegaskan Vaksin Mandiri Bukan Untuk Bisnis”, diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210126154917-92-598598/kemenkes-tegaskan-vaksin-mandiri-bukan-untuk-bisnis> pada tanggal 14 April 2021 pukul 20:49 WIB.

“Daftar Vaksin COVID-19 yang Digunakan di Indonesia”, diunduh dari <https://covid19.go.id/tentang-vaksin-covid19> pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 08:50 WIB.

Fokus Bisnis Kami, diunduh dari <https://www.biofarma.co.id/our-focus/> pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 18:25 WIB.

Merry Dame Cristy Pane, “Vaksin Novavax”, diunduh dari <https://www.alodokter.com/vaksin-novavax> pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 09:18 WIB.

Muhammad Robith Adani, “Mengenal Apa itu *Internet of Things* dan Contoh Penerapannya”, diunduh dari <https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-internet-of-things/> pada tanggal 4 November 2021 pukul 08:04 WIB.

Narasi News Room, “Komnas KIP: 30 Meninggal Usai Vaksin COVID-19, “Ini Laporan Penyebabnya”, diunduh dari [https://www.instagram.com/p/CPQVFDyj6BM/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CPQVFDyj6BM/?utm_medium=copy_link) pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 08:50 WIB.

Peta Sebaran COVID-19, diunduh dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> pada tanggal 23 November 2021 pukul 18:45 WIB.

Profil Perusahaan PT Bio Farma, diunduh dari <https://www.biofarma.co.id/wp-content/uploads/2019/09/Profil-Perusahaan.pdf> pada tanggal 14 April 2021 pukul 19:18 WIB.

Putri Syahrida, Hukum Perlindungan Konsumen, diunduh dari [https://www.academia.edu/13165918/HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN](https://www.academia.edu/13165918/HUKUM_PERLINDUNGAN_KONSUMEN) pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 18.54 WIB.

Riwayat Singkat Perusahaan, diunduh dari <https://www.biofarma.co.id/media/image/originals/uploads/2019/09/Riwayat-Singkat-Perusahaan.pdf> pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 18:17 WIB.

Rosy Dewi Arianti Saptoyo, 21 Februari 2021, “WHO Jelaskan Soal Efek Samping Setelah Disuntik Vaksin Covid-19”, diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/21/153000565/who-jelaskan-soal-efek-samping-setelah-disuntik-vaksin-covid-19?page=all> pada tanggal 14 April 2021 pukul 18:55 WIB.

Soraya Novika, 3 Maret 2021, “Setahun Corona di RI, Ini 3 Dampaknya ke Ekonomi”, diunduh dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5479673/setahun-corona-di-ri-ini-3-dampaknya-ke-ekonomi> pada tanggal 15 April 2021 pukul 10:53 WIB.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tentang Kami, diunduh dari <http://ylki.or.id/profil/tentang-kami/> pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 19.22 WIB.



